

Penargetan Bansos Generasi Baru:

Mengurangi **Exclusion Error** & Inclusion Error
dengan **Data Terpadu**



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi
exclusion error & inclusion error dengan data terpadu*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

26 March 2026

PENARGETAN BANSOS GENERASI BARU: MENGURANGI *EXCLUSION ERROR* DAN *INCLUSION ERROR* DENGAN DATA TERPADU

Abstrak

Penargetan bantuan sosial (bansos) merupakan jantung dari efektivitas kebijakan perlindungan sosial. Ketika rumah tangga miskin yang layak justru tidak menerima bantuan, terjadi *exclusion error*; sebaliknya, ketika rumah tangga yang relatif lebih mampu tetap menikmati bantuan, terjadi *inclusion error*. Di Indonesia, problem ini bukan semata-mata persoalan teknis administrasi, melainkan persoalan tata kelola negara, kualitas data, interoperabilitas antarlembaga, kapasitas pemerintah daerah, serta kemampuan sistem untuk membaca perubahan kesejahteraan rumah tangga yang sangat dinamis. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia masih 23,36 juta orang atau 8,25 persen penduduk, dengan tingkat kemiskinan perdesaan yang tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Dalam konteks seperti ini, akurasi penargetan bansos menjadi sangat menentukan, bukan hanya bagi efisiensi fiskal, tetapi juga bagi legitimasi negara dan kepercayaan publik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru dalam reformasi penargetan bansos melalui pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini, yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan DTKS sebagai basis utama penyaluran bansos dan dibangun melalui integrasi DTKS, Regsosek, serta P3KE. Pergeseran ini penting karena model lama terbukti menghadapi berbagai keterbatasan:

data identitas yang tidak valid, ketidakselarasan NIK dan KK, mekanisme pembaruan yang tidak merata, keterbatasan akses digital di wilayah terpencil, dan lemahnya koordinasi lintas program. Temuan BPK pada data DTKS Januari 2020, misalnya, menunjukkan jutaan NIK dan KK tidak valid, sementara evaluasi mutakhir menunjukkan bahwa tidak ada program bantuan utama yang menjangkau lebih dari 60 persen dari kelompok 10 persen termiskin yang layak. ([Setneg](#))

Dengan menggunakan pendekatan akademik-naratif, makalah ini membahas evolusi penargetan bansos di Indonesia, menjelaskan akar masalah salah sasaran, menganalisis potensi DTSEN sebagai tulang punggung model penargetan generasi baru, dan menawarkan kerangka implementasi yang menekankan empat prinsip: akurasi, dinamika, interoperabilitas, dan akuntabilitas. Makalah ini menyimpulkan bahwa bansos generasi baru harus bergerak dari sekadar “membagi bantuan” menuju “membangun sistem keputusan sosial yang belajar secara terus-menerus.” Dengan demikian, data terpadu tidak boleh berhenti sebagai arsip administratif, tetapi harus menjadi infrastruktur publik yang hidup, responsif, dan etis untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar mencapai warga yang paling membutuhkan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata Kunci

bantuan sosial; penargetan bansos; exclusion error; inclusion error; DTSEN; DTKS; Regsosek; kemiskinan; perlindungan sosial; tata kelola data

Isi Makalah

1. Pendahuluan

Dalam setiap negara modern, bantuan sosial bukan hanya instrumen belas kasihan negara kepada warga miskin, melainkan salah satu mekanisme koreksi terhadap ketimpangan, kerentanan, dan guncangan ekonomi.

Negara yang serius membangun keadilan sosial tidak cukup hanya menyediakan anggaran bansos; negara juga harus memastikan bahwa bantuan itu sampai kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan nominal yang relevan, dan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah isu penargetan menjadi sangat penting. Penargetan yang buruk dapat melahirkan paradoks yang ironis: negara terlihat aktif membelanjakan dana sosial, tetapi warga termiskin tetap tertinggal, sementara sebagian penerima yang tidak lagi layak masih bertahan dalam daftar bantuan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indonesia memiliki alasan kuat untuk menjadikan reformasi penargetan bansos sebagai agenda strategis. Walaupun tingkat kemiskinan nasional menurun menjadi 8,25 persen pada September 2025, angka ini tetap merepresentasikan 23,36 juta penduduk miskin. Lebih jauh lagi, kemiskinan di perdesaan tercatat 10,72 persen, jauh di atas perkotaan yang 6,60 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan bansos tidak bisa dipisahkan dari geografi ketimpangan, struktur pasar kerja, kualitas layanan dasar, serta kerentanan rumah tangga di luar garis kemiskinan resmi yang dapat dengan mudah jatuh miskin saat terkena guncangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam literatur perlindungan sosial, dua bentuk salah sasaran yang paling sering dibahas adalah *exclusion error* dan *inclusion error*. *Exclusion error* terjadi ketika rumah tangga yang layak menerima bantuan justru tidak tercakup; *inclusion error* terjadi ketika rumah tangga yang sebenarnya tidak layak justru menerima bantuan. Presentasi Bappenas tahun 2024 menggambarkan *inclusion error* sebagai rumah tangga yang tidak layak tetapi tetap mendapat bantuan, dan *exclusion error* sebagai rumah tangga yang layak tetapi tidak memperoleh bantuan. Laporan World Bank tentang wilayah terpencil di Indonesia juga menekankan bahwa *exclusion error* pada dasarnya adalah kesenjangan antara jumlah yang menerima bantuan dan jumlah yang sebenarnya layak menerimanya. ([The World Bank Docs](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu*

Jika dua jenis error ini berlangsung terus-menerus, dampaknya melampaui problem administratif. Dari sisi fiskal, negara membayar mahal untuk program yang efisiensinya menurun. Dari sisi sosial, warga miskin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena mereka melihat bantuan tidak selalu mengikuti kebutuhan. Dari sisi politik, bansos berisiko dipersepsikan sebagai arena patronase, bukan sebagai instrumen keadilan. Karena itu, penargetan bansos generasi baru harus dipahami bukan sebagai proyek teknologi semata, melainkan sebagai reformasi kelembagaan yang menggabungkan statistik, administrasi publik, etika data, dan manajemen perubahan. (bpk.go.id)

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah tersebut. Pada 2025, pemerintah memperkenalkan DTSEN sebagai basis data tunggal sosial ekonomi nasional yang menggantikan DTKS dalam penyaluran bansos. BPS menjelaskan bahwa DTSEN dibangun dari integrasi tiga sumber utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE. Pada saat yang sama, Sekretariat Negara menegaskan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadikan DTSEN sebagai basis resmi penyaluran bansos yang lebih terarah, dengan pemeringkatan desil 1 sampai 10. Ini menandai perubahan paradigma dari basis data kesejahteraan yang relatif statis menuju arsitektur data sosial ekonomi yang lebih luas, lebih terintegrasi, dan lebih dinamis. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Makalah ini bertujuan menjelaskan mengapa reformasi menuju penargetan bansos generasi baru sangat mendesak, bagaimana akar masalah salah sasaran terbentuk, dan apa yang perlu dilakukan agar data terpadu benar-benar menurunkan *exclusion error* serta *inclusion error*. Pendekatan yang digunakan bersifat analitis-naratif: data dan kebijakan dibaca bukan hanya sebagai angka dan regulasi, tetapi sebagai cerita tentang bagaimana negara berusaha mengenali warganya secara lebih adil. (SKALA)

2. Evolusi Penargetan Bansos di Indonesia: Dari DTKS ke DTSEN

Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu

Untuk memahami makna DTSEN, kita perlu melihat perjalanan penargetan bansos di Indonesia secara historis. Selama bertahun-tahun, DTKS berfungsi sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial, termasuk PKH, Program Sembako, PIP, dan PBI-JKN. World Bank mencatat bahwa DTKS berperan sebagai *social registry* untuk mengidentifikasi calon penerima beragam program perlindungan sosial di Indonesia. Dalam kerangka ini, DTKS adalah fondasi penting, tetapi ia tetap bekerja dalam ekosistem yang terbatas oleh kualitas pembaruan, sinkronisasi identitas, dan kapasitas pelaksanaan di lapangan. ([World Bank](#))

Pada tahap berikutnya, Indonesia mengembangkan Regsosek. BPS menjelaskan bahwa data Regsosek dikumpulkan pada 2022 dan dilanjutkan melalui Forum Komunikasi Publik pada 2023 sebagai data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia untuk perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Bahkan, sejak awal, Regsosek dirancang agar terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lain hingga level desa/kelurahan. Artinya, Regsosek membawa visi yang lebih luas dibanding registry bansos tradisional: bukan hanya mengenali siapa yang miskin, tetapi juga membaca profil sosial ekonomi penduduk secara lebih komprehensif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Transformasi penting terjadi pada 2025 ketika BPS menyatakan bahwa DTSEN merupakan integrasi tiga sumber data, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE. Sekretariat Negara lalu menegaskan bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadikan DTSEN sebagai pengganti DTKS untuk penyaluran bansos, dikelola oleh BPS, dan diperingkat dari desil 1 sampai desil 10. Perubahan ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan satu daftar kesejahteraan lama, tetapi membangun satu *single source of truth* yang lebih kaya secara variabel, lebih kuat secara identitas, dan lebih memungkinkan untuk sinkronisasi lintas program. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di situs resmi Cek Bansos Kemensos, dijelaskan bahwa sumber data penerima manfaat kini adalah DTSEN. Situs itu juga menerangkan bahwa desil adalah kelompok kesejahteraan keluarga berdasarkan variabel sosial ekonomi, perumahan, dan aset; desil 1 adalah 10 persen terbawah dan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Yang sangat penting, desil dinyatakan bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa/kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos; BPS kemudian menghitung ulang secara periodik. Bagi PKH dan Sembako, prioritas utama adalah desil 1–4. Ini menunjukkan bahwa reformasi penargetan tidak hanya menyangkut integrasi data, tetapi juga mekanisme pemeringkatan yang lebih adaptif. (cekbansos.kemensos.go.id)

Narasi perubahan ini dapat dibayangkan melalui kisah sederhana. Pada era DTKS murni, seorang ibu kepala keluarga di desa terpencil mungkin telah tercatat bertahun-tahun lalu, tetapi kondisi rumah tangganya berubah tanpa segera tercermin dalam sistem. Sebaliknya, sebuah keluarga baru miskin akibat PHK atau bencana bisa belum tercapture. Dengan pendekatan DTSEN, negara berupaya mengurangi keterlambatan membaca perubahan itu dengan integrasi data yang lebih luas, *ground check*, pembaruan berkala, dan pintu partisipasi publik melalui fitur usul-sanggah. Dalam logika manajemen publik, inilah pergeseran dari model registri pasif ke model registri yang lebih aktif dan belajar. ([Setneg](#))

3. Mengapa Salah Sasaran Masih Tinggi?

Meskipun Indonesia telah lama mengembangkan sistem penargetan, bukti menunjukkan bahwa salah sasaran tetap menjadi problem serius. Laporan World Bank tentang *adaptive social protection* menyebut bahwa program-program bantuan sosial utama Indonesia secara keseluruhan hanya menjangkau sekitar 61,39 persen dari dua kuintil termiskin. Bahkan, tidak ada program bantuan utama yang mencakup lebih dari 60 persen dari kelompok 10 persen termiskin yang layak. Kalimat ini sangat penting karena mengingatkan bahwa problem utama Indonesia bukan sekadar

kebocoran ke atas, tetapi juga banyaknya warga miskin yang tetap berada di luar jangkauan sistem. ([World Bank](#))

Salah satu akar persoalannya adalah kualitas data dasar. BPK dalam *Review Report on the 2021 VNR of SDGs* mencatat bahwa DTKS Januari 2020 mengandung 10.922.479 NIK tidak valid, 16.373.682 nomor KK tidak valid, 5.702 nama kosong, dan 86.465 nomor identitas ganda. Publikasi BPK lainnya menambahkan bahwa ada keluarga penerima manfaat bermasalah yang tetap menerima bansos, dan sebagian KPM yang tidak lagi berhak masih dibayar hingga September 2020. Temuan seperti ini menegaskan bahwa kesalahan penargetan sering bermula jauh sebelum bantuan disalurkan, yakni pada saat identitas sosial warga belum benar-benar “terbaca” dengan akurat oleh negara. ([bpk.go.id](#))

Akar kedua adalah lemahnya pembaruan data yang konsisten di seluruh wilayah. World Bank melaporkan bahwa pembaruan DTKS sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah dan desa, mulai dari pengusulan keluarga miskin baru, penghapusan keluarga yang telah mampu, hingga perbaikan detail keluarga termasuk NIK. Namun, kapasitas pembaruan tidak seragam. Dalam beberapa kasus, masalah NIK dan KK membuat nama keluarga tidak dapat diinput ke SIKS-NG. Bahkan, laporan yang sama menyebut banyak tantangan di lapangan: desa tidak memiliki akses ke SIKS-NG, internet terbatas, anggaran verifikasi dan validasi minim, serta sinkronisasi data terjadi pada jadwal yang tidak selalu cocok dengan kondisi konektivitas di desa terpencil. ([World Bank](#))

Akar ketiga adalah ketidaksesuaian antara dinamika kemiskinan dan ritme administrasi pemerintah. Kemiskinan bersifat sangat cair. Rumah tangga yang hari ini berada sedikit di atas garis kemiskinan bisa jatuh ke bawah garis itu akibat sakit, gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Sebaliknya, rumah tangga yang dulunya miskin bisa mengalami perbaikan ekonomi. Jika sistem data tidak bergerak cukup cepat, maka *exclusion error* dan *inclusion error* akan muncul secara alamiah. Karena itulah Bappenas

dan BPS menekankan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis dan pembaruannya harus terus dilakukan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akar keempat adalah desain proses identifikasi yang terlalu *supply-driven*. Laporan World Bank tentang wilayah terpencil menyebutkan bahwa proses *intake* masih sangat bergantung pada aparat lokal dan staf program dalam mengidentifikasi siapa yang masuk, sehingga rawan subjektivitas dan *exclusion error*, terutama ketika rumah tangga miskin tidak tahu bagaimana cara mendaftar atau memperbarui status mereka. Dalam bahasa manajemen pelayanan publik, sistem yang terlalu bergantung pada inisiatif penyelenggara tanpa kanal umpan balik warga akan lebih sulit menangkap perubahan kesejahteraan yang berlangsung cepat. ([World Bank](#))

Akar kelima ialah kendala geografis dan administratif. World Bank mencatat bahwa pada 2021, syarat NIK untuk masuk DTKS menimbulkan tantangan besar bagi keluarga yang datanya tidak cocok dengan Dukcapil; sekitar 5,8 juta penerima PBI-JKN tercatat tereksklusi dari DTKS karena perbedaan data NIK dengan catatan Dukcapil. Di wilayah terpencil, hambatan semacam ini bertumpuk dengan jarak, akses transportasi, dan konektivitas yang lemah. Pada titik ini, kita melihat bahwa salah sasaran bansos bukan hanya problem "siapa miskin", tetapi juga problem "siapa yang berhasil menembus pintu birokrasi." ([World Bank](#))

Dari sisi fiskal dan pengawasan, salah sasaran juga membawa biaya besar. Presentasi pejabat Bappenas tahun 2024 menyebut bahwa rata-rata akurasi penyaluran empat program reguler hanya 41,87 persen pada 2022 dan memperkirakan pemborosan anggaran dapat mencapai Rp76,2 triliun per tahun. Sementara itu, BPK dalam LHP LKPP 2022 mencatat berbagai masalah belanja bansos, termasuk penerima yang tidak sesuai kriteria/tidak tepat sasaran, duplikasi penyaluran, serta penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran pada beberapa program. Walaupun angka-angka dari kedua sumber ini lahir dari metodologi yang berbeda, pesan strategisnya sama:

Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu

penargetan bukan perkara pinggiran, melainkan penentu kualitas belanja negara. ([The World Bank Docs](#))

4. Mengapa Data Terpadu Menjadi Jawaban Strategis?

Reformasi menuju data terpadu menjadi jawaban strategis karena masalah salah sasaran pada dasarnya adalah masalah keterputusan informasi. Rumah tangga diketahui oleh desa, tetapi belum sinkron dengan pusat. Satu program tahu bahwa penerima sudah meningkat kesejahteraannya, tetapi informasi itu tidak terbaca oleh program lain. Data lapangan berubah, tetapi registri pusat terlambat menyesuaikan. Dalam situasi seperti itu, setiap program berjalan seperti pulau kecil. DTSEN berupaya mengatasi fragmentasi itu dengan mempersatukan sumber data dan memperjelas siapa yang menjadi pengelola serta bagaimana data digunakan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara konseptual, keunggulan data terpadu terletak pada tiga hal. Pertama, ia memperluas basis informasi. Jika DTKS lebih berorientasi pada daftar kesejahteraan sosial, maka DTSEN memperoleh kekuatan tambahan dari Regsosek dan P3KE. Kedua, ia memungkinkan pemeringkatan yang lebih halus melalui desil, bukan sekadar kategorisasi biner miskin/nonmiskin. Ketiga, ia membuka peluang interoperabilitas lintas program dan lintas institusi sehingga keputusan penyaluran bantuan tidak lagi berdiri di atas satu sumber tunggal yang rapuh, melainkan di atas konfirmasi berlapis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

BPS menegaskan bahwa DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Ini penting. Dalam praktik penargetan, kata "dipadankan" mengandung makna administratif dan strategis sekaligus. Secara administratif, pemadanan membantu meminimalkan identitas ganda, data kosong, dan ketidakcocokan NIK. Secara strategis, pemadanan memungkinkan kebijakan sosial bergerak dari sekadar daftar penerima menuju sistem

Rudy C Tarumingkeng: *Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu*

identifikasi kebutuhan. Negara bukan lagi hanya tahu “siapa menerima”, tetapi juga “mengapa ia layak menerima”. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Langkah-langkah implementatif yang terlihat pada 2025 juga menunjukkan arah yang menjanjikan. BPS menyebut bahwa 33.603 pendamping PKH dilatih dalam 1.120 kelas daring untuk mendukung *ground check* DTSEN. Pada Mei 2025, pemerintah menyatakan penyaluran bansos triwulan II bagi 16,5 juta KPM menggunakan patokan DTSEN, dengan sekitar 12 juta keluarga menjadi sasaran *ground check* dan sekitar 6,9 juta keluarga telah terverifikasi masuk ke pemutakhiran. Pada saat yang sama, pemerintah menemukan sekitar 1,8 juta KPM yang tidak lagi layak dan mengalihkan alokasi kepada kelompok yang lebih berhak; beberapa bulan setelah itu, Mensos menyebut hasil *ground check* menemukan 1,9 juta KPM tidak memenuhi syarat lagi. Perbedaan angka ini menunjukkan proses pemutakhiran yang sedang berjalan, bukan kontradiksi kebijakan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sudut pandang manajemen kinerja sektor publik, temuan 1,8–1,9 juta penerima yang tidak lagi layak justru memperlihatkan manfaat nyata dari data terpadu. Dalam sistem lama, keluarga-keluarga ini mungkin tetap bertahan di daftar bantuan bertahun-tahun. Dalam sistem yang diperbarui, data baru mendorong koreksi alokasi. Ini bukan berarti sistem sudah sempurna, tetapi menunjukkan bahwa penargetan generasi baru mulai memiliki kemampuan “membersihkan diri” secara berkala. Mekanisme seperti inilah yang dibutuhkan untuk menurunkan *inclusion error*. ([Setneg](#))

Lebih jauh lagi, data terpadu memberi peluang untuk menurunkan *exclusion error* melalui jalur partisipatif. Pemerintah menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan bukan hanya melalui integrasi antarlembaga, tetapi juga melalui fitur usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Di situs resmi Kemensos dijelaskan pula bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa/kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi. Dengan demikian, data terpadu tidak boleh dipahami sebagai data

yang “dikunci” pusat, tetapi sebagai sistem yang dapat dikoreksi publik secara teratur. ([Setneg](#))

5. Pilar Penargetan Bansos Generasi Baru

Agar DTSEN sungguh-sungguh mengurangi dua jenis error tadi, diperlukan rancangan penargetan bansos generasi baru yang bertumpu pada beberapa pilar.

Pilar pertama adalah identitas yang bersih dan dapat diverifikasi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa jutaan NIK dan KK tidak valid dapat menggoyahkan seluruh rantai penyaluran. Karena itu, integrasi dengan data kependudukan tidak boleh berhenti pada proses awal, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan. Setiap perubahan status keluarga, perpindahan alamat, kematian, perkawinan, atau perubahan tanggungan harus sedapat mungkin tercermin dengan cepat dalam sistem. Tanpa identitas yang kuat, penargetan akan terus beroperasi di atas pondasi yang rapuh. ([bpk.go.id](#))

Pilar kedua adalah pemeringkatan kesejahteraan yang lebih granuler. Penggunaan desil 1–10 merupakan kemajuan penting karena memungkinkan pemerintah membedakan prioritas secara lebih tajam. Dalam pendekatan lama, kategori miskin sering kali diperlakukan terlalu kasar. Dengan desil, pemerintah dapat menyesuaikan program: PKH dan Sembako diprioritaskan untuk desil 1–4, sedangkan program lain dapat memakai ambang berbeda. Dari perspektif kebijakan publik, ini memungkinkan desain yang lebih presisi, sekaligus mengurangi perdebatan biner seolah seseorang hanya bisa “miskin” atau “tidak miskin”. ([cekbansos.kemensos.go.id](#))

Pilar ketiga adalah pembaruan dinamis. Sifat kesejahteraan rumah tangga yang berubah cepat mensyaratkan sistem yang tidak menunggu terlalu lama untuk memperbaiki daftar. Pernyataan pemerintah bahwa DTSEN akan dimutakhirkan setiap tiga bulan memberi sinyal arah yang tepat.

Namun, pembaruan periodik harus ditopang kapasitas nyata di lapangan: SDM pendamping, operator dinas sosial, perangkat desa, dukungan internet, dan SOP yang jelas. Jika tidak, janji dinamika hanya akan menjadi jargon administratif. ([Setneg](#))

Pilar keempat adalah interoperabilitas lintas program. Pengalaman reformasi bansos yang didukung World Bank menunjukkan pentingnya pengembangan sistem yang interoperabel, termasuk integrasi e-PKH dengan SIKS-NG serta penggunaan data dari lembaga lain untuk memperbarui DTKS. Interoperabilitas ini penting karena rumah tangga miskin tidak hidup dalam kategori program. Mereka hidup sebagai keluarga utuh dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan perlindungan guncangan. Sistem negara juga harus mampu melihat mereka secara utuh. ([World Bank](#))

Pilar kelima adalah kanal pengaduan dan koreksi yang efektif. Reformasi PKH sebelumnya menekankan pentingnya *grievance redress mechanism* dan keterbukaan informasi. Ini sejalan dengan logika bahwa tidak ada basis data sosial yang akan selalu sempurna. Justru karena sistem tidak sempurna, negara harus menyediakan pintu koreksi yang mudah diakses. Dalam konteks bansos generasi baru, fitur usul-sanggah, pengaduan lokal, dan audit berbasis jejak digital harus dipandang sebagai bagian inti dari penargetan, bukan sekadar pelengkap. ([World Bank](#))

Pilar keenam adalah sensitivitas wilayah dan kelompok rentan. Laporan World Bank menunjukkan bahwa wilayah terpencil menghadapi hambatan khusus: jarak jauh, ketersediaan layanan keuangan, konektivitas lemah, dan ketidakcocokan jadwal sinkronisasi data. Karena itu, penargetan generasi baru tidak boleh mengasumsikan bahwa prosedur yang berhasil di kota akan otomatis berhasil di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Penargetan yang adil harus mengakui bahwa kesetaraan prosedur tidak selalu menghasilkan kesetaraan hasil. Kadang-kadang, sistem justru perlu

memberi perlakuan operasional yang berbeda agar hasilnya benar-benar setara. ([World Bank](#))

6. Sebuah Narasi Kasus: Dua Keluarga, Dua Jenis Error

Bayangkan dua keluarga di dua tempat yang berbeda.

Keluarga pertama tinggal di desa pesisir terpencil. Kepala keluarga bekerja sebagai buruh lepas dengan pendapatan musiman. Istri mengurus dua anak usia sekolah. Secara ekonomi mereka termasuk sangat rentan. Namun ketika pendamping desa memeriksa data, ditemukan NIK salah satu anggota keluarga tidak sinkron dengan Dukcapil dan KK mereka belum terbaca benar dalam sistem. Karena masalah administratif itu, mereka tidak masuk daftar penerima Program Sembako. Inilah wajah konkret *exclusion error*: kemiskinan mereka nyata, tetapi sistem tidak berhasil mengenalinya tepat waktu. Kisah semacam ini sejalan dengan temuan World Bank mengenai hambatan NIK/KK, keterbatasan SIKS-NG, dan kendala wilayah terpencil dalam mengakses perlindungan sosial. ([World Bank](#))

Keluarga kedua tinggal di pinggiran kota. Lima tahun lalu mereka memang tergolong miskin dan tercatat dalam basis bansos. Namun kini anak-anak mereka sudah bekerja, rumahnya membaik, dan kepemilikan aset meningkat. Meski demikian, nama mereka masih muncul dalam daftar bantuan karena pembaruan data tidak segera terjadi. Di sisi lain, tetangga yang baru kehilangan pekerjaan belum masuk daftar. Inilah *inclusion error*: sistem terlalu lambat menyadari bahwa penerima lama sudah "naik kelas", sehingga alokasi yang seharusnya dialihkan ke keluarga yang lebih layak justru tertahan. Data pemerintah pada 2025 tentang ditemukannya sekitar 1,8–1,9 juta KPM yang tidak lagi layak menunjukkan bahwa kasus seperti ini bukan imajinasi, melainkan problem kebijakan yang nyata. ([Setneg](#))

Melalui lensa dua keluarga ini, kita melihat bahwa penargetan bansos generasi baru pada dasarnya adalah upaya agar negara mampu melakukan dua hal sekaligus: pertama, menemukan mereka yang tersembunyi dari

sistem; kedua, melepaskan mereka yang datanya tertinggal dari kenyataan. Dengan kata lain, reformasi data terpadu bukan hanya soal menambah penerima, melainkan juga soal memperbaiki rotasi keadilan. ([SKALA](#))

7. Tantangan Implementasi DTSEN

Walaupun menjanjikan, DTSEN tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Tantangan pertama adalah tata kelola lintas lembaga. Risalah kebijakan SKALA 2025 menegaskan bahwa pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial ekonomi hanya dapat berjalan melalui sinergi dan kolaborasi lintas pihak, sekaligus mengingatkan bahwa masih ada tantangan desain pemutakhiran, regulasi koordinasi lintas kelembagaan, keterbatasan SDM, dan anggaran di daerah. Dengan kata lain, masalah bansos generasi baru bukan lagi sekadar “punya data atau tidak,” tetapi “siapa berwenang memperbarui apa, kapan, dan dengan sumber daya apa.” ([SKALA](#))

Tantangan kedua adalah perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Bappenas menekankan bahwa berbagi pakai DTSEN harus mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi 2025 tentang berbagi pakai DTSEN juga menekankan keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum. Ini krusial karena semakin terintegrasi sebuah basis data, semakin besar pula konsekuensi jika tata kelolanya lemah. Akurasi bansos tidak boleh dibeli dengan mengorbankan martabat dan privasi warga miskin. ([Bappenas](#))

Tantangan ketiga adalah kapasitas daerah. Banyak problem pembaruan data justru terjadi bukan karena pusat tidak memiliki visi, melainkan karena desa, kecamatan, kabupaten, dan dinas sosial menghadapi keterbatasan operator, jaringan, biaya verifikasi, dan kadang juga konflik sosial lokal. Laporan World Bank secara eksplisit menyinggung keterbatasan anggaran, akses sistem, dan jadwal sinkronisasi di wilayah terpencil. Ini berarti bahwa keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh kualitas *last mile governance*. ([World Bank](#))

Tantangan keempat adalah menjaga agar algoritme pemeringkatan tidak menjadi "kotak hitam." Situs resmi Cek Bansos sudah menjelaskan bahwa desil dihitung dari variabel sosial ekonomi, perumahan, dan aset. Itu langkah awal yang baik. Namun, untuk jangka panjang, publik memerlukan penjelasan yang cukup tentang mengapa suatu keluarga berada di desil tertentu dan bagaimana koreksi dapat diajukan. Dalam administrasi publik modern, transparansi penjelasan sama pentingnya dengan kecanggihan model penilaian. (cekbansos.kemensos.go.id)

Tantangan kelima adalah menjaga keseimbangan antara presisi dan inklusivitas. Sistem yang terlalu ketat dapat menurunkan *inclusion error*, tetapi berpotensi menaikkan *exclusion error*. Sebaliknya, perluasan jangkauan yang terlalu longgar dapat mengurangi eksklusi, tetapi meningkatkan kebocoran. Karena itu, tujuan kebijakan tidak boleh disederhanakan menjadi "nol error," melainkan "error serendah mungkin dengan perlindungan maksimum bagi yang paling rentan." Inilah seni kebijakan sosial: bukan mencari presisi matematis semata, tetapi keadilan yang operasional. Temuan World Bank tentang tingginya *exclusion error* pada program-program utama Indonesia seharusnya menjadi pengingat bahwa terlalu fokus mengejar kebersihan daftar tanpa memperluas jangkauan juga bisa berbahaya. (World Bank)

8. Agenda Kebijakan ke Depan

Berdasarkan pembahasan di atas, arah kebijakan penargetan bansos generasi baru sebaiknya menempuh beberapa agenda strategis.

Pertama, pemerintah perlu menjadikan DTSEN sebagai *single source of truth* yang operasional, bukan sekadar simbol integrasi. Ini berarti setiap program bantuan utama harus memakai referensi data yang sama, dengan perbedaan hanya pada aturan eligibilitas program, bukan pada basis identitas penerimanya. Semakin banyak "daftar paralel" yang hidup, semakin besar ruang terjadinya duplikasi dan konflik data. (Setneg)

Kedua, pembaruan harus dilakukan secara berlapis: administratif, statistik, dan partisipatif. Jalur administratif berasal dari Dukcapil dan data sektoral; jalur statistik berasal dari survei dan *ground check*; jalur partisipatif berasal dari usul-sanggah warga. Kombinasi tiga jalur ini lebih kuat daripada mengandalkan satu jalur saja. Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa *ground check* besar-besaran dan partisipasi melalui aplikasi dapat membantu memperbaiki daftar penerima. ([Setneg](#))

Ketiga, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja penargetan yang jelas dan diumumkan berkala: tingkat *exclusion error*, tingkat *inclusion error*, waktu rata-rata pembaruan status rumah tangga, jumlah usul-sanggah yang diterima dan diselesaikan, serta jumlah penerima yang dikoreksi antartriwulan. Tanpa indikator seperti itu, reformasi data mudah dipuji secara simbolik tetapi sulit diukur hasil nyatanya. Bukti dari BPK dan World Bank menunjukkan bahwa masalah akurasi dapat dinilai; karena itu, perbaikannya pun harus diukur secara rutin. ([bpk.go.id](#))

Keempat, wilayah terpencil harus menjadi prioritas pembelajaran kebijakan. Jika sistem dapat bekerja baik di wilayah dengan konektivitas rendah, hambatan geografis tinggi, dan kapasitas lokal terbatas, maka kemungkinan besar ia akan bekerja lebih baik di wilayah lain. Sebaliknya, bila reformasi hanya berhasil di kota besar, maka kita sedang membangun sistem yang rapi di pusat tetapi rapuh di pinggiran. ([World Bank](#))

Kelima, reformasi bansos generasi baru harus dihubungkan dengan agenda yang lebih luas: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi. Data terpadu seharusnya tidak hanya memutuskan siapa mendapat transfer, tetapi juga membantu negara memahami jalan keluar rumah tangga dari kemiskinan. Risalah kebijakan tentang DTSEN menegaskan bahwa data yang terpilah dan mutakhir memberi peluang lebih baik untuk menganalisis akar masalah kemiskinan serta menyusun program pembangunan yang lebih inklusif. Dengan kata

lain, tujuan akhir bansos bukan hanya distribusi, tetapi transformasi.

([SKALA](#))

9. Penutup

Penargetan bansos generasi baru pada dasarnya adalah upaya memperbaiki cara negara melihat warganya. Ketika negara melihat dengan kabur, maka bansos salah sasaran. Ketika negara melihat dengan lambat, maka bantuan terlambat mengikuti perubahan kesejahteraan. Ketika negara melihat secara terpisah-pisah antarprogram dan antarlembaga, maka kebijakan sosial mudah terjebak dalam duplikasi, kekosongan, dan konflik data. Karena itu, inti reformasi bukan hanya digitalisasi, melainkan pembentukan cara pandang negara yang lebih utuh, lebih cepat, dan lebih adil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indonesia kini memiliki fondasi penting untuk bergerak ke arah itu. DTSEN, integrasi DTKS–Regsosek–P3KE, *ground check* berskala besar, pemeringkatan desil, serta kanal usul-sanggah menunjukkan bahwa reformasi sedang berlangsung. Namun, perjalanan masih panjang. Data terpadu harus terus dibersihkan, dijaga, dijelaskan, dan diperbarui. Pemerintah pusat dan daerah harus membangun disiplin bersama bahwa bansos bukan ruang improvisasi semata, tetapi sistem keputusan yang menuntut akurasi statistik, integritas birokrasi, dan kepekaan sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bansos generasi baru bukanlah seberapa canggih platform datanya, melainkan seberapa kecil kemungkinan seorang warga miskin terlewat dari bantuan yang ia butuhkan, dan seberapa kecil pula kemungkinan bantuan negara tertahan pada keluarga yang tidak lagi berhak. Bila dua hal ini dapat dicapai secara bertahap, maka reformasi data terpadu akan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan negara kesejahteraan yang lebih presisi, manusiawi, dan akuntabel di Indonesia. ([World Bank](#))

Glosarium

Bansos

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada individu atau rumah tangga untuk mengurangi beban ekonomi, melindungi dari guncangan, dan mendukung kesejahteraan sosial.

DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu basis data yang sebelumnya digunakan sebagai rujukan utama berbagai program perlindungan sosial.

DTSEN

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yaitu basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Regsosek

Registrasi Sosial Ekonomi, yaitu sistem/basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

P3KE

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu sumber data yang diintegrasikan ke dalam DTSEN. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Exclusion Error

Kesalahan ketika rumah tangga yang layak menerima bantuan justru tidak menerima bantuan. ([World Bank](#))

Inclusion Error

Kesalahan ketika rumah tangga yang tidak layak atau tidak lagi layak tetap menerima bantuan. ([The World Bank Docs](#))

Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu

Desil

Pengelompokan kesejahteraan keluarga ke dalam sepuluh kelompok; desil 1 adalah 10 persen terbawah dan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. (cekbansos.kemensos.go.id)

Ground Check

Verifikasi lapangan untuk memutakhirkan data sosial ekonomi dan memeriksa kesesuaian kondisi riil rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](http://BadanPusatStatistikIndonesia))

SIKS-NG

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, platform yang digunakan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial dan pembaruan data. ([World Bank](http://WorldBank))

PKH

Program Keluarga Harapan, program bantuan tunai bersyarat yang menjadi salah satu pilar utama perlindungan sosial Indonesia. (Setneg)

PBI-JKN

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu kelompok peserta JKN yang iurannya dibayari pemerintah. ([World Bank](http://WorldBank))

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). *BPS hadir peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data Regsosek*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). *BPS turut cetak sejarah dalam pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pencanangan ground check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional*. BPS.

Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. BPS.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Review report on the 2021 VNR of SDGs Indonesia*. BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Warta Pemeriksa English Version, Edition 3, Vol. II*. BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas LKPP Tahun 2022*. BPK RI.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah salurkan bansos PKH dan sembako bagi 16,5 juta keluarga*. Setneg.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Presiden Prabowo instruksikan penyaluran bansos tepat sasaran dan berkelanjutan*. Setneg.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). *Cek Bansos Kemensos*. Kemensos.

SKALA. (2025). *Optimalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk layanan dasar inklusif: Pembelajaran dari implementasi Regsosek di daerah*. SKALA.

World Bank. (2020). *Indonesia social assistance reform program additional financing*. World Bank.

World Bank. (2021). *Implementation status & results report: Indonesia social assistance reform program*. World Bank.

World Bank. (2024). *Adaptive social protection, human capital & climate change*. World Bank.

World Bank. (2024). *Social protection inclusion in Indonesia's remote areas: Identifying and addressing gaps & challenges*. World Bank.

Rudy C Tarumingkeng: Penargetan bansos generasi baru: mengurangi exclusion error & inclusion error dengan data terpadu

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 26 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c4fd80-92e0-839e-b07c-f525ba74803a>